

INTISARI

Sejak munculnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan di desa melalui berbagai peraturan yang diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi peraturan yang diterbitkan pemerintah semakin lama semakin banyak dan masih sering berubah. Hal ini menjadi tantangan bagi aparatur desa untuk memahami peraturan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana pemahaman dan implementasi aparatur desa terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa belum membaca dan belum mengetahui seluruh peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Dampaknya terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Menurut aparatur desa, peraturan yang diterbitkan terlalu banyak sehingga membuat mereka bingung dan malas untuk membacanya. Selain itu pemerintah desa tidak dapat menentukan sendiri program prioritas untuk desanya karena adanya proses evaluasi dari pemerintah kabupaten dalam setiap perencanaan. Aparatur desa menganggap hal tersebut membatasi keleluasaan mereka dalam menggunakan anggaran desa.

Kata Kunci: pengetahuan aparatur desa, pengelolaan keuangan desa, peraturan keuangan desa.

ABSTRACT

Since Law no. 6 of 2014 concerning rural was issued, the government tried to improve rural financial management through various regulations issued by both the central government and local governments. However, there are more regulations issued by the government and are still changing frequently. This is a challenge for rural government to understand rural financial management regulations and how to implement it. This study aims to explore how the rural government understands and implements rural financial management regulations. The results showed that the rural government had not read and did not understand all the regulations regarding rural financial management. The impact is a discrepancy in the implementation from the initial stage (planning) to the end stage (accountability) of rural financial management. According to rural government, there were too many regulations issued that made them confused and unwanted to understand it. In addition, the rural government cannot determine priority programs for its village because there is an evaluation process from the district government in every planning. They consider this policy is to limit their authority in using the village budget.

Keywords: *lore of rural government, rural financial management, rural finansial regulations.*